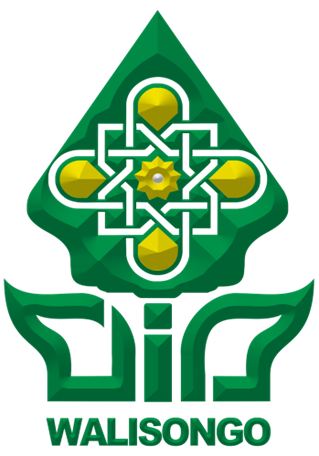
# MAKALAH

**SEJARAH HUKUM AGRARIA DI INDONESIA**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Kelompok

Mata Kuliah: Hukum Agraria

Dosen Pengampu: Muhammad Shoim, S. Ag, M. H.



DisusunOleh :

1. Hamdan Yazid (2102016146)
2. Hamid Hanafi Hanan (2102016153)
3. Fatika Amalia Rachmawati (2102016150)
4. Lintang Arjunil Wafa (2102016161)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN WALISONGO**

**2022**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kelompok matkul Hukum Agraria yang diampu oleh bapak Muhammad Shoim, S. Ag, M. H. berupa makalah yang berjudul “Sejarah Hukum Agraria di Indonesia”. Shalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswatul hasanah bagi seluruh manusia dan mengemban pencerahan kehidupan.

Makalah ini memaparkan tentang sejarah hukum agraria pada masa penjajahan/kolonial, sejarah hukum agrarian pada masa kemerdekaan dan proses terbentuknya UUPA (undang-undang pokok agraria).

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan makalah ini. Kepada teman-teman yang membantu memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada kami atas terselesainya tugas ini.

Semoga penulisan makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca, dan kami sadar bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna, apabila ada kritik dan saran  daripembaca, penulis mengucapkan terimakasih. Karena kritik dan saran dari pembaca dapat menyempurnakan makalah ini.

Semarang, 25 Agustus 2022

Penulis

# DAFTAR ISI

[MAKALAH i](#_Toc112361485)

[KATA PENGANTAR ii](#_Toc112361486)

[DAFTAR ISI iii](#_Toc112361487)

[BAB I 4](#_Toc112361488)

[PENDAHULUAN 4](#_Toc112361489)

[1.1 LatarBelakang 4](#_Toc112361490)

[1.2 RumusanMasalah 4](#_Toc112361491)

[1.3 Tujuan 5](#_Toc112361492)

[BAB II 6](#_Toc112361493)

[PEMBAHASAN 6](#_Toc112361494)

[2.1 Hukum Agraria Pada Masa Penjajahan/Kolonial 6](#_Toc112361496)

[2.2 Hukum Agraria Pada Masa Kemerdekaan 14](#_Toc112361497)

[2.3 Proses Terbentuknya UUPA 16](#_Toc112361498)

[BAB III 21](#_Toc112361499)

[PENUTUP 21](#_Toc112361500)

[3.1 Kesimpulan 21](#_Toc112361501)

[3.2 Saran-saran 21](#_Toc112361502)

[DAFTAR PUSTAKA 23](#_Toc112361503)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## LatarBelakang

Kajian terhadap Hukum Agraria sudah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, baik dalam bentuk buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan di dalam seminar-seminar serta simposium yang bertajuk Agraria. Tetapi kajian-kajian tersebut tidak begitu fokus mengkaji tentang sejarah hukum agraria, bagaimana lahirnya hukum agraria di Indonesia sampai terbentuknya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

Bahkan wacana untuk mengamandemen Undang-undang Pokok Agraria, yang selanjutnya dalam makalah ini disebut UUPA, terus dilakukan guna menyesuaikan peraturan-peraturan di bidang ke-agraria-an yang sudah dianggap tidak mengakomodir perkembangan masyarakat.

Ini membuktikan bahwa hukum – khususnya hukum agararia terus berkembang seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masayarakat, untuk itu diperlukan suatu kajian ilmiah tentang bagaimana rangkaian sejarah hukum agraria Indonesia guna mengetahui setiap perkembangan yang terjadi di bidang agraria.

Dengan demikian setidaknya dari kajian itu dapat diperoleh bahan untuk dijadikan pegangan dalam melakukan pembaharuan (hukum) terhadap hukum agraria. Substansi yang akan dibahas di dalam makalah singkat ini terfokus kepada sejarah hukum agraria sebagai salah satu bagian yang integral dari sistem hukum Indonesia yang memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan masyarakat guna mewujudkan cita-cita dan tujuan negara.

## RumusanMasalah

1. Bagaimana hukum agrarian pada masa penjajahan /kolonial?
2. Bagaimana hukum agrarian pada masa kemerdekaan?
3. Bagaimana proses terbentuknya UUPA?

## Tujuan

1. Untuk mengetahui sejarah hukum agraria pada masa penjajaahan/colonial.
2. Untuk mengetahui sejarah hukum agraria pada masa kemerdekaan.
3. Untuk mengetahui proses terbentuknya UUPA

# BAB II

# PEMBAHASAN



## Hukum Agraria Pada Masa Penjajahan/Kolonial

Dari segi berlakunya, Hukum Agraria di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Hukum agraria Kolonial yang berlaku sebelum Indonesia merdeka bahkan berlaku sebelum diundangkannya UUPA, yaitu tanggal 24 September 1960; dan
2. Hukum Agraria nasional yang berlaku setelah diundangkannya UUPA.

Dari konsideran UUPA di bawah kata ”menimbang”, dapat diketahui beberapa ciri dari hukum agraria kolonial pada huruf b, c dan d, sebagai berikut :

1. Hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;
2. Hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat;
3. Bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.

Beberapa ketentuan hukum agraria pada masa kolonial beserta ciri dan sifatnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Sebelum tahun 1870**
2. **Pada masa VOC (*Vernigde Oost Indische Compagnie*).**

VOC didirikan pada tahun 1602 – 1799 sebagai badan perdagangan sebagai upaya guna menghindari persaingan antara pedagang Belanda kala itu. VOC tidak mengubah struktur penguasaan dan pemilikan tanah, kecuali pajak hasil dan kerja rodi. Beberapa kebijaksanaan politik pertanian yang sangat menindas rakyat Indonesia yang ditetapkan oleh VOC, antara lain:[[1]](#footnote-1)

1. *Contingenten.*

Pajak hasil atas tanah pertanian harus diserahkan kepada penguasa kolonial (kompeni). Petani harus menyerahkan sebagian dari hasil pertaniannya kepada kompeni tanpa dibayar sepeser pun.

1. *Verplichte leveranten*.

Suatu bentuk ketentuan yang diputuskan oleh kompeni dengan para raja tentang kewajiban meyerahkan seluruh hasil panen dengan pembayaran yang harganya juga sudah ditetapkan secara sepihak. Dengan ketentuan ini, rakyat tani benar-benar tidak bisa berbuat apaapa. Mereka tidak berkuasa atas apa yang mereka hasilkan.

1. *Roerendiensten*.

Keijaksanaan ini dikenal dengan kerja rodi, yang dibebankan kepada rakyat Indonesia yang tidak mempunyai tanah pertanian.

1. **Masa Pemerintahan Gubernur Herman Willem Daendles (1800-1811).**

Awal dari perubahan struktur penguasaan dan pemilikan tanah dengan penjualan tanah, hingga menimbulkan tanah partikelir. Kebijakannya itu adalah dengan menjual tanah-tanah rakyat Indonesia kepada orang-orang Cina, Arab maupun bangsa Belanda sendiri. Tanah itulah yang kemudian disebut tanah partikelir.

Tanah partikelir adalah tanah *eigendom* yang mempunyai sifat dan corak istimewa. Yang membedakan dengan tanah *eigendom* lainnya ialah adanya hak-hak pada pamiliknya yang bersifat kenegaraan yang disebut *landheerlijke rechten* atau hak pertuanan. Hak pertuanan, misalnya :[[2]](#footnote-2)

1. Hak untuk mengangkat atau mengesahkan kepemilikan serta memberhentikan kepala-kepala kampung/desa;
2. Hak menuntut kerja paksa (rodi) atau memungut uang pengganti kerja paksa dari penduduk;
3. Hak mengadakan pungutan, baik yang berupa uang maupun hasil pertanian dari penduduk;
4. Hak untuk mendirikan pasar-pasar;
5. Hak untuk memungut biaya pemakaian jalan dan penyebrangan;
6. Hak untuk mengharuskan penduduk tiga hari sekali memotong rumput untuk keperluan tuan tanah, sehari dalam seminggu untuk menjaga rumah atau gudang-gudangnya dan sebagainya.
7. **Masa Pemerintahan Gubernur Thomas Stamford Rafles (1811-1816).**

Pada masa Rafles semua tanah yang berada di bawah kekuasaan *government* dinyatakan sebagai *eigendom government*. Dengan dasar ini setiap tanah dikenakan pajak bumi.

Dari hasil penelitian Rafles, pemilikan tanah-tanah di daerah swapraja di Jawa disimpulkan bahwa semua tanah milik raja, sedang rakyat hanya sekedar memakai dan menggarapnya. Karena kekuasaan telah berpindah kepada Pemerintah Inggris, maka sebagai akibat hukumnya adalah pemilikan atas tanah-tanah tersebut dengan sendirinya beralih pula kepada Raja Inggris.

Dengan demikian, tanah-tanah yang dikuasai dan digunakan oleh rakyat itu bukan miliknya, melainkan milik Raja Inggris. Oleh karena itu, mereka wajib memberikan pajak tanah kepada Raja Inggris, sebagaimana sebelumnya diberikan kepada raja mereka sendiri.

Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pajak tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak tanah tidak langsung dibebankan kepada petani pemilik tanah, tetapi ditugaskan kepada kepala desa. Para kepala desa diberi kekuasaan utnuk menetapkan jumlah sewa yang wajib dibayar oleh tiap petani.
2. Kepala desa diberikan kekuasaan penuh untuk mengadakan perubahan pada pemilikan tanah oleh para petani. Jika hal itu diperlukan guna memperlancar pemasukan pajak tanah. Dapat dikurangi luasnya atau dapat dicabut penguasaannya, jika petani yang bersangkutan tidak mau atau tidak mempu membayar pajak tanah yang ditetapkan baginya, tanah yang bersangkutan akan diberika kepada petani lain yang sanggup memenuhinya.
3. Praktik pajak tanah menjungkirbalikan hukum yang mengatur tentang pemilikan tanah rakyat sebagai besarnya kekuasaan kepal desa. Seharusnya luas pemilikan tanahlah yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar, tetapi dalam praktik pemungutan pajak tanah itu justru berlaku yang sebaliknya. Besarnya sewa yang sanggup dibayarlah yang menentukan luas tanah yang boleh dikuasai seseorang.
4. **Masa Pemerintahan Gubernur Johanes van den Bosch.**

Pada tahun 1830 Gubernur Jenderal van den Bosch menetapkan kebijakan pertanhan yang dikenal dengan sistem Tanam Paksa atau *Cultuur Stelsel*. Dalam sistem tanam paksa ini petani dipaksa untuk menanam suatu jenis tanaman tertentu yang secara langsung maupun tidak lengsung dibutuhkan oleh pasar internasional paa waktu itu. Hasil pertanian tersebut diserahkan kepada pemerintah kolonial tanpa mendapat imbalan apapun, sedangkan bagi rakyat yang tidak mempunyai tanah pertanian wajib menyerahkan tenaga kerjanya yaitu seperlima bagian dari masa kerjanya atau 66 hari untuk waktu satu tahun.

Adanya monopoli pemerintah dengan sistem tanam paksa dalam lapangan pertanian telah membatasi modal swasta dalam lapangan pertanian besar. Di samping pada dasarnya para penguasa itu tidak mempunyai tanah sendiri yang cukup luas dengan jaminan yang kuat guna dapat mengusahakan dan mengelola tanah dengan waktu yang cukup lama. Usaha yang dilakukan oleh pengusaha swasta pada waktu itu adalah menyewa tanah dari negara. Tanah-tanah yang biasa disewa adalah tanah-tanah negara yang masih kosong.

1. **Sesudah tahun 1870 (hukum tanah administratif Belanda)**
2. ***Agrarische Wet* (AW).**

Pada tahun 1870 lahirlah *Agrarische Wet* yang merupakan pokok penting dari hukum agraria dan semua peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan pemerintah masa itu sebagai permulaan hukum agraria barat. Ide awal dikelularkannya *Agrarische Wet* (AW) ini adalah sebagai respon terhadap keingina perusahaan-perusahaan asing yang bergerak dalam bidang pertanian untuk berkembang di Indonesia, namun hak-hak rakyat atas tanahnya harus dijamin. AW ini merupakan undang-undang di negeri Belanda, yang diterbitkan pada tahun 1870, dengan diundangkan dalam S.1870-55. dimasukkannya ke Indonesia, dengan memasukkan Pasal 62 RR, yang pada mulanya terdiri dari 3 ayat, dengan penambahan 5 ayat tersebut sehingga Pasal 62 RR menjadi 8 ayat, yakni ayat 4 sampai dengan ayat 8. pada akhirnya Pasal 62 RR ini menjadi Pasal 51 *Indische Staatsregeling.*

Pasal 51 IS ini memuat :

Ayat (1) Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah.

Ayat (2) Di dalam larangan ini tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas, yang diperuntukan perluasan kota dan desa serta mendirikan bangunan-bangunan kerajinan/industri.

Ayat (3) Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah dengan ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi. Ada pun tanah-tanah yang telah dibuka oleh orang-orang Indonesia asli, atau yang dipunyai oleh desa sebagai tempat pengembalaan umum atau atas dasar lainnya tidak boleh dipersewakan.

Ayat (4) Menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan ordonansi diberikan tanah dengan Hak Erfacht selama waktu tidak lebih dari 75 tahun.

Ayat (5) Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai ada pemberian Hak yang melanggar Hak penduduk asli.

Ayat (6) Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah yang telah dibuka oleh orang-orang Indonesia asli untuk keperluan mereka sendiri, atau tanah-tanah kepunyaan desa sebagai tempat pengembalaan umum atas dasar lainnya, kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 133 dan untuk keperluan pengusahaan tanaman yang diselenggarakan atas perintah atasan dengan pemberian ganti rugi atas tanah.

Ayat (7) Tanah yang dipunyai oleh orang-orang Indonesia asli dengan Hak Milik (hak pakai perseorangan yang turun-temurun) atas permintaan pemiliknya yang sah diberikan kepadanya dengan hak *eigendom* dengan pembatasan-pembatasan seperlunya yang ditetapkan dengan ordonansi dan dicantumkan dalam surat *eigendomnya*, yakni mengenai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan desa serta wewenang untuk menjualnya kepada bukan orang Indonesia asli.

Ayat (8) Menyewakan tanah-tanah atau menyerahkan tanah untuk dipakai oleh orang-orang Indonesia asli, kepada bukan orang Indonesia asli dilakukan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan ordonansi.

Terbentuknya AW merupakan upaya desakan dari para kalangan pengusaha di negeri Belanda yang karenan keberhasilan usahanya mengalami kelebihan modal, karenanya memerlukan bidang usaha baru untuk menginvestasikannya. Dengan banyaknya persediaan tanah hutan di jawa yang belum dibuka, para pengusaha itu menuntut untuk diberikannya kesempatan membuka usaha di bidang perkebunan besar.

Sejalan dengan semangat liberalisme yang sedang berkembang dituntut pengantian sistem monopoli negara dan kerja paksa dalam melaksanakan *cultuur stelse*, dengan sistem persaingan bebasa dan sistem kerja bebas, berdasarkan konsepsi kapitalisme liberal.

Tuntutan untuk mengakhiri sistem tanam paksa dan kerja paksa dengan tujuan bisnis tersebut, sejalan dengan tuntutan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dari golongan lain di negeri Belanda, yang melihat terjadinya penderitaan yang sangat hebat di kalangan petani Jawa, sebagai akibat penyalah gunaan wewenang dalam melaksanakan *cultuur stelsel* oleh para pejabat yang bersangkutan.

Dari itu jelaslah tujuan dikeluarkannya AW adalah untuk membuka kemungkinan dan memberikan jaminan hukum kepada para pengusaha swasta agar dapat berkembang di Hinda Belanda. Selain itu AW juga bertujuan untuk :

1. Memperhatikan perusahaan swasta yang bermodal besar dengan jalan :
2. Memberikan tanah negara dengan hak Erfacht yang berjangka waktu lama, sampai 75 th
3. Untuk memberikan kemungkinan bagi para pengusaha untuk menyewakan tanah adat/rakyat.
4. Memperhatikan kepentigan rakyat asli, dengan jalan :
5. Melindungi hak-hak tanah rakyat asli.
6. Memberikan kepada rakyat asli untuk memperoleh hak tanah baru (*Agrarische eigendom*).

Untuk pelaksanaan AW tersebut, maka diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan dan keputusan, diantaranya dalam *Agrarische Besluit.*

1. *Agrarische Besluit* (AB).

Ketentuan-ketentuan AW pelaksanaannya diatur lebih lanjutan dalam peraturan dan keputusan. Salah satu keputusan yang paling penting adalah apa yang dimuat dalam *Koninklijk Besluit* (KB), yang kemudian dikenal dengan nama *Agrarische Besluit* (AB), S.1870-118.

AB terdiri dari tiga bab, yaitu ;

1. Pasal 1-7 tentang hak atas tanah;
2. Pasal 8-8b tentang pelepasan tanah;
3. Pasal 19-20 tentang peraturan campuran.

Dalam Pasal 1 AB tersebut dimuat satu pernyataan yang asas yang sangat penting bagi perkembangan dan pelaksanaan hukum tanah administratif Hindi Belanda. Asas tersebut dinilai sebagai kurang menghargai , bahkan “memperkosa” hak-hak rakyat atas tanah yang bersumber pada hukum adat.

Dinyatakan dalam Pasal 1 AB tersebut :[[3]](#footnote-3)

*“Behoudens opvolging van de tweede en derde bepaling der voormelde wet, blijft het beginsel gehandhaafd, dat alle grond, waarop niet anderen reght van eigendom wordt bewezen, domein van de staat is”.*

Jika diterjemahkan : “Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Agrarische Wet, tetap dipertahankan asas, bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapar membuktikan sebagai hak eigendomnya, adalah domein negara (milik) negara”.

Maksud dari adanya pernyataan domein itu adalah untuk memberikan ketegasan sehingga tidak ada keragu-raguan, bahwa satusatunya penguasa yang berwenang untuk memberikan tanah-tanah kepada pihak lain adalah Pemerintah. Dengan adanya pernyataan domein, maka tanah-tanah di Hindi Belanda dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Vrijlands Domein atau tanah negara bebas, yaitu tanah yang di atasnya tidak ada hak penduduk bumi putera.
2. Onvrijlands Domein atau tanah negra tidak bebas, yaitu tanah yang di atasnya ada hak penduduk maupun desa.

Dalam praktiknya, pernyataan domein mempunyai dua fungsi, yakni :

1. Sebagai landasan hukum bagi pemerintah kolonial untuk dapat memberikan tanah dengan hak-hak barat seperti yang diatur dalam KUHPerdata, misalnya hak eigendom, hak opstal, dan hak erfacht.
2. Untuk keperluan pembuktian pemilikan, yaitu apabila negara berperkara, maka negara tidak pelu membuktikan hak eigendomnya atas tanah, tetapi piha lainlah yang wajib membuktikan haknya.

Untuk diketahui bahwa hak rakyat Indonesia atas tanahnya adalah berdasarkan hukum adat, sedangkan dalam hukum adat tidak adak ketentuan hukum yang sama dengan Pasal 570 BW, maka denga sekaligus semua tanah dari rakyat Indonesia termasuk menjadi tanah negara (domein negara). Yang tidak termasuk tanah negara, menurut Pemerintah Hindia Belanda, adalah tanah-tanah seperti di bawah ini :

1. Tanah-tanah daerah swapraja;
2. Tanah-tanah yang menjadi eigendom orang lain;
3. Tanah-tanah partikulir;
4. Tanah-tanah eigendom agraria (Agrarische eigendom).
5. Hukum Tanah yang Dualistik

Akibat dari politik pertanahan Hindia Belanda, maka hukum pertanahan berstruktur ganda atau dualistic, yaitu di satu pihak berlaku hukum tanah adat yang bersumber dari hukum adat dan di lain pihak berlaku hukum tanah barat yang pokok-pokok ketentuanya terdapat dalam buku II KUHP Perdata, yang merupakan hukum tertulis.

Dengan demikian di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, terdapat perbedaan hukum yang berlaku. Untuk golongan eropa dan yang di persamakan dengan itu dan golongan Timur Asing berlaku hukum tanah barat yang berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam buku II KUHP Perdata. sedangkan untuk golongan Bumi Putera (pribumi) berlaku hukum tanah adat yang bersumber dari hukum adat. Sehingga terdapat adanya tanah-tanah yang di kuasai dan di haki dengan hak-hak atas tanah berdasarkan hukum tanah Barat (KUHPerdata), dan terdapat pula tanah-tanah yang di kuasai dan di haki dengan hak-hak atas tanah berdasaarkan pada hukum tanah adat. [[4]](#footnote-4)

## Hukum Agraria Pada Masa Kemerdekaan

Diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia mengakibatkan bangsa Indonesia memperoleh kedaulatan di tangan sendiri. Pada masa itu pendudukan tanah oleh masyarakt sudah menjadi hal yang sangat komplek karena masyarakat yang belum berkesempatan menduduki tanah perkebunan dalam waktu singkat berusaha untuk menduduki tanah.

Sejak pengakuan keadulatan oleh Belanda atas negara Indonesia, barulah pemerintah mulai menata kembali pendudukan tanah oleh rakyat dengan melakukan hal-hal berikut :[[5]](#footnote-5)

1. Mendata kembali berapa luas tanah dan jumlah penduduk yang mengusahakan tanah-tanah perkebunan untuk usaha pertanian. Di daerah Malang luasnya tanah perkebunan ± 20.000 Ha. pendudukan oleh rakyat seluas ± 8.000 Ha. Daerah Kediri luas tanah perkebunan ± 23.000 Ha. pendudukan oleh rakyat seluas ± 13.000 Ha. dan menurut perkiraan dari luas tanah perkebunan di Jawa yang seluas ± 200.000 Ha. telah diduduki rakyat seluas ± 80.000 Ha.
2. Pendudukan tanah perkebunan yang hampir dialami oleh semua perkebunan lambat laun akan menghambat usaha pembangunan kembali suatu cabang produksi yang penting bagi negara serta memperlambat pesatnya kemajuan produksi hasil-hasil perkebunan yang sangat diperlukan. Sebagian tanah perkebunan yang terletak di daerah pegunungan sehingga taidak cocok untuk usaha pertanian, untuk itu perlu ditertibkan.
3. Pemakian tanah-tanah perkebunan yang berlokasi di daerah pegunungan tersebut dikuatirkan akan menimbulkan bahayb erosi dan penyerapan air.
4. Pemakaian tanah-tanah oleh rakyat di beberapa daerah menimbulkan ketegangan dan kekeruhan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

Untuk itu, maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1954 tentang : Penyelesaian soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat. Penyelesaian akan diusahakan bertingkat 2 (dua) sebagai berikut :

1. Tahap pertama; terlebih dahulu akan diusahakan agar agenda segala sesuatu dapat dicarikan penyelesaiannya atas dasar kata sepakat antar pemilik perkebunan dengan rakyat/penggarap;
2. Tahap kedua; apabila perundingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak berhasil, maka dalam rangka penyelesaian penggarapan tanah perkebunan tersbut akan mengambil kebijakan sendiri dengan memperhatikan :
3. Kepentingan rakyat dan kepentingan penduduk, letak perkebunan yangbersangkutan;
4. Kedudukan perusahaan perkebunan di dalam susunan perekonomuian negara.

Agar pelaksanaan dari keputusan tersebut dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, maka diatur ketentuan sebagai berikut :

1. Kemungkinan pencabutan dan pembatalan hak atas tanah perkebunan milik para pengusaha, baik sebagian meupun seluruhnya, jika mereka dengan sengaja menghalangi upaya penyelesaian;
2. Ancaman hukum terhadap mereka yang melanggar atau menghalangi;
3. Ancaman hukuman terhadap mereka yang tidak dengan seizin pemilik perkebunan, masih terus memakai tanah perkebunan sesudah tuntutan ini diberlakukan;
4. Ketentuan tentang harus mengadakan pengosongan.

Untuk mencegah pendudukan kembali tanah perkebunan oleh rakyat, maka pemerintah megeluarakan perarturan tentang larangan pendudukan tanah tanpa izin yang berhak yaitu Undang-undang Nomor : 51 Prp. Tahun 1960.

Selain ketentuan dia atas, dalam upaya menata kembali hukum pertanahan pemerintah telah membuat kebijakan dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor : 19 Tahun 1956 tentang : Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi.
2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1956 tentang : Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah Perkebunan.
3. Undang-undang Nomor : 29 Tahun 1956 tentang : Peraturan Pemerintah dan Tindakan-tindakan Mengenai Tanah Perkebunan.
4. Ketentuan lain yang menyangkut pemakaian tanah-tanah milik warga negara Belanda yang kembali ke negerinya.

## Proses Terbentuknya UUPA

Hukum Agraria nasional yang dikenal dengan UUPA di bentuk berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menentukanbumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketetntuan tersebut dimaksudkan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 Alenia ke IV yaitu negara memajukan kesejahteraan umum.[[6]](#footnote-6)

Perjalaanan panjang dalam uapaya perancangan UUPA dilakukakan oleh Lima Panitia rancangan, yaitu Panitia Agraria Yogyakarta, Panitia Agraria Jakarta, Panitia Rancangan Soewahjo, dan Panitia Rancangan Soenarjo.[[7]](#footnote-7)

1. **Panitia Rancangan Yogyakarta.**
2. Dasar Hukum.

Panitia ini dibentuk dengan Penetapan Presiden Nomor : 16 Tahun 1948 tanggal 21 Mei 1948, berkedudukan di Yogyakarta diketuai oleh Sarimin Reksodihardjo, Kepala Bagian Agraria Kementerian Agraria.

Panitia ini bertugas anatara lain :

* 1. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang soal-soal mengenai hukum tanah pada umumnya;
  2. Merencanakan dasar-dasar hukum tanah yang memuat politik agararia Republik Indonesia;
  3. Merencanakan peralihan, penggantian, pencabutan peraturan-peraturan lama tentang tanah yang tidak sesuai lagi dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka;
  4. Menyelidiki soal-soal lain yang berkenaan dengan hukum tanah.

1. Asas-asas yang Menjadi Dasar Hukum Agraria Indonesia.

Panitia ini mengusulkan tentang asas-asas yang akan merupakan dasar-dasar Hukum Agraria yang baru, yaitu :

* 1. Meniadakan asas domein dan pengakuan adanya hak ulayat;
  2. Mengadakan peraturan yang memungkinkan adanya hak perseorangan yang dapat dibebani hak tanggungan;
  3. Mengadakan penyelidikan terutama di negara tetangga tentang kemungkinan pemberian hak milik atas tanah kepaa orang asing;
  4. Perlu diadakan penetapan luas minimum pemilikan tanah bagi apra petani kecil untuk dapat hidup layak untuk Jawa 2 hektar;
  5. Perlu adanya penetapan luas maksimum pemilikan tanah yang siusulkan untuk pulau Jawa 10 hektar, tanpa memandang macamnya tanah, sedang di luar Jawa masih diperlukan penelitian lebih lanjut;
  6. Perlu diadkan regidsrasi tanah milik dan hak-hak lainnya.

1. Keanggotaan Panitia. Panitia Yogyakarta beranggotakan sebagai berikut :
2. Para pejabat dari berbagai kementrian dan jawatan;
3. Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;
4. Para ahli hukum, wakil-wakil daerah dan ahli adat;
5. Wakil dari dari sarikat buruh perkebunan;
6. **Panitia Jakarta.**
7. Dasar Hukum.

Panitia Yogyakarta dibubarkan dengan Keputusan Presiden Nomor : 3 6 Tahun 1951 tanggal 19 Maret 1951, sekaligus dubentuk Panitia Agraria Jakarta yang berkedudukan di Jakarta.

1. Keanggotaan. Panitia Jakarta beranggotakan :
   1. Ketua : Sarimin Reksodihardjo, kemudian pada tahun 1953 diganti oleh Singgih Praptodihardjo (Wakil Kepala Bagian Agraria Kementrian Agararia);
   2. Pejabat-pejabat kementrian;
   3. Pejabat-pejabt jawatan; dan
   4. Wakil-wakil organisasi tani.
2. Usulan kepada pemerintah. Dalam laporannya panitia ini mengusulkan beberapa hal dalam hal tanah pertanian, sebagai berikut :
3. Mengadakan batas minimum pemilikan tanah, yaitu 2 hektar dengna mengadakan peninjauan lebih lanjut sehubungan dengan berlakunya hukum adat dan hukum waris;
4. Mengadakan ketentuan batas maksimum pemilikan tanah, hak usaha, hak sewa, dan hak pakai;
5. Pertanian rakyat hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan tidak dibedakan antara warga negara asli dan bukan asli. Badan hukum tidak dapat mengerjakan tanah rakyat;
6. Bagunan hukum untuk pertanian rakyat ialah hakl milik, hak usaha, hak sewa, dan hak pakai;
7. Pengeturan hak ulayat sesuai dengan pokok-pokok dasar negara dengan suatu undang-undang.
8. **Panitia Soewahjo.**
9. Dasar Hukum.

Guna mempercepat proses pembentukan undang-undang agraria nasional, maka dengan Keputusan Presiden RI tertanggal 14 Januari 1956 Nomor : 1 Tahun 1956, berkedudukan di Jakarta, diketuai oleh Soewahjo Soemodilogo, Sekretaris Jenderal Kementrian Agraria. Tugas utama panitia ini adalah mepersiapkan rencana undang-undang pokok agararia yang nasional, sedapat-dapatnya dalam waktu satu tahun.

1. Rancangan Undang-undang.

Panitia ini berhasil menyusun naskah Rancangan Undang-undang Pokok Agraria pada tanggal 1 Januari 1957 yang pada berisi :

* 1. dihapuskannya asas domein dan diakuinya hak ulayat, yang harus ditundukkan pada kepentingan mum (negara);
  2. Asas domein diganti dengan hak kekuasaan negara atas dasar ketentuan Pasal 38 ayat (3) UUDS 1950;
  3. Dualisme hukum agraria dihapuskan. Secara sadar diadakan kesatuan hukum yang akan memuata lembaga-lembga dan unsur-unsur yang baik, baik yang terdapat dalam hukum adat maupun hukum barat;
  4. Hak-hak atas tanah : hak milik sebagai hak yang terkuat yang berfungsi sosial kemudian ada hak usaha, hak bangunan dan hak pakai;
  5. Hak milik hanya boleh dipunyai oleh warga negara Indonesia yang tidak diadakan pembedaan antara waraga negara asli dan tidak asli. Badan-badan hukum pada asasnya tidak boleh mempunyai hak milik atas tanah;
  6. Perlu diadakan penetapan batan maksimum dan minimum luas tanah yang boleh menjadi milik seseorang atau badan hukum;
  7. Tanah pertanian pada asasnya perlu dikerjakan dan diushakan sendiri oleh pemiliknya;
  8. Perlu diadakan pendaftaran tanah dan perencanaan penggunaan tanah.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 97 Tahun 1958 tanggal 6 Mei 1958 Panitia Negara Urusan Agraria (Panitia Soewahjo) dibubarkan.

1. **Rancangan Soenarjo.**

Setelah diadakan perubahan sistematika dan rumusan beberapa pasal, Rancangan Panitia Soewahjo diajukan oleh Menteri Soenarjo ek Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk membahas rancangan tersebut, DPR perlu mengumpulkan bahan yang lebih lengkap dengan meminta kepada Universitas Gadjah Mada, selanjutnya membentuk panitia *ad hoc* yang terdiri dari :

Ketua merangkap anggota : A.M. Tambunan

Wakil Ketua merangkap anggota : Mr. Memet Tanumidjaja

Anggota-anggota : Notosoekardjo

: Dr. Sahar glr Sutan Besar K.H.

: Muslich

: Soepeno

: Hadisiwojo

: I.J. Kasimo

Selain dari Universitas Gadjah Mada bahan-bahan juga diperoleh dari Mahkamah Agung RI yang diketuai oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro.

# BAB III

# PENUTUP

## 3.1 Kesimpulan

Mencermati pembahasan dalam makalah ini terkhusus analisis terhadap sejarah hukum agraria, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Bahwa hukum agraria pada masa penjajahan/kolonial di bagi menjadi 2 periode. Periode pertama yaitu pada sebelum tahun 1870 dimana pada periode tersebut di bagi menjadi 4 masa, yaitu pada masa voc, masa pemerintahan gubernur Herman Willem Daendles, masa pemerintahan Gubernur Thomas Stamford Rafles,dan yang terakhir pada masa pemerintahan Gubernur Johanes Van den Bosch. Kemudian pada periode kedua yaitu setelah tahun 1870 lahirlah Agrarische wet (AW), setelah itu Agrarische Besluit (AB), hingga terbentuk hukum pertanahan berstuktur ganda atau dualistik, yaitu satu pihak berlaku hukum tanah adat, dan pihak lain berlaku hukum tanah barat.
2. Hukum agraria pada masa kemerdekaan di mulai sejak pengakuan kedaulatan oleh belanda atas negara Indonesia, barulah pemerintah mulai menata kembali pendudukan tanah oleh rakyat dengan melakukan ketentuan-ketentuan yang sudah kami cantumkan pada bab pembahasan.
3. Dalam makalah ini juga di bahas mengenai proses atau sejarah terbentuknya UUPA dari Panitia Agraria Yogyakarta, Panitia Agraria Jakarta, Panitia Rancangan Soewahjo, dan Panitia Rancangan Soenarjo.

## 3.2 Saran-saran

Alhamdulillah, dengan terselesainya makalah ini penulis ingin memberikan saran-saran bagi para pembaca dan khususnya diri saya sendiri antara lain:

1. Bagi Akademis penulis sangat meminta maaf apabila banyak kekurangan dalam penulisan makalah tersebut dikarenakan keterbatasan referensi dan penulis hanya menganalisis beberapa kasus saja. Dan apabaila ada peneliti yang selanjutnya maka penulis mengharapkan untuk melengkapi kekuranganya seperti pasal-pasal yang ada di UU maupun UUPA yang kami tidak cantumkan satu persatu di setiap sub bab pembahasan.
2. Penulis, mengharapkan bagi para pembaca bisa mengajukan krikitikan jika terdapat kesalahan dalam penulisan makalah ini.
3. Penulis sangat berterima kasih bagi yang para pembaca dan minta maaf jika terjadi kesalah pahaman dalam makalah ini.

# DAFTAR PUSTAKA

Arba. (2017). *Hukum Agraria Indonesia, sejarah Perkembangan Politik Hukum Agraria Di Indonesia.* Jakarta:Sinar Grafika

Hakim, Lukamanul Aal. “Sejarah Hukum Agraria”. *Jurnal Al Hakim.*

Harsono, Boedi. (1999). *Hukum Agraria Indonesia* *: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta:Djambatan.

Suardi. (2005). *Hukum Agraria*. Jakarta:Badan Penerbit Iblam.

Urip, Santoso. (2005). *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta:Kencana.

1. Urip Santoso. (2005). *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta:Kencana. Edisi Pertam. Cet. Ke-2. hlm. 16. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-2)
3. Boedi Harsono. (1999). *Hukum Agraria Indonesia* *: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta:Djambatan. Edisi Revisi. Cet. Ke-8. hlm. 41 dst. [↑](#footnote-ref-3)
4. Arba. (2017). *Hukum Agraria Indonesia, sejarah Perkembangan Politik Hukum Agraria Di Indonesia.* (cet. 3). Jakarta:Sinar Grafika*.* Hlm. 28 [↑](#footnote-ref-4)
5. Suardi. (2005). *Hukum Agraria*. Jakarta:Badan Penerbit Iblam. hlm. 19 [↑](#footnote-ref-5)
6. Arba. (2017). *Hukum Agraria Indonesia, sejarah Perkembangan Politik Hukum Agraria Di Indonesia.* (cet. 3). Jakarta:Sinar Grafika*.* Hlm. 56 [↑](#footnote-ref-6)
7. Hakim, Lukamanul Aal. “Sejarah Hukum Agraria”. *Al Hakim.*  [↑](#footnote-ref-7)